

DISERTASI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI
PAPUA DAN PAPUA BARAT**

***THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING ON
COMMUNITY WELFARE IN PAPUA AND WEST PAPUA
PROVINCE***

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

H A S B I A H

A013201001



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

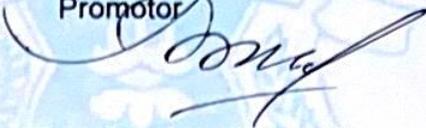
disusun dan diajukan oleh

HASBIAH
A013201001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal **24 Juli 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

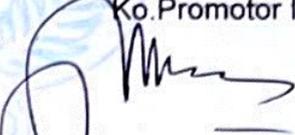
Promotor


Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA
NIP : 19340722 198702 1 001

Ko.Promotor I


Dr. Madris, SE., DPS., M.Si
NIP: 19601231 198811 1 002

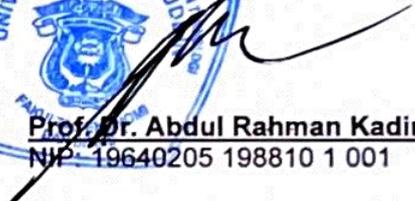
Ko.Promotor II


Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA
NIP: 19630516 199003 1001

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi


Dr. Madris, SE., DPS., M.Si
NIP: 19601231 198811 1 002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP: 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasbiah
NIM : A013201001
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul :

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Hasbiah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhana wa Ta'ala, Rabb Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Salallahu'alaihi wassalam. Disertasi ini merupakan salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Secara utuh disertasi ini berjudul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Papua dan Papua Barat".

Perkenankan pada kesempatan yang baik ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin,
2. Prof. H. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prof. Dr. Budu, Ph.D, Sp, M (K)., M.MedEd selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan atas perhatian yang diberikan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dr. Madris , SE., DPS., M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, yang telah

meluangkan banyak waktu untuk memberi motivasi, khususnya dalam menyelesaikan disertasi ini.

4. Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA selaku Promotor, Dr. Madris, SE., DPS., M.Si. selaku Co-promotor I dan Dr. Anas Iswanto Anwar, SE, MA. selaku Co-promotor II yang ditengah kesibukannya tetap meluangkan waktu dan mencurahkan kemampuan yang dimiliki untuk membimbing, memotivasi hingga berbagi pengalaman yang sangat bermanfaat dalam proses penelitian dan penulisan disertasi ini. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Doktor Ilmu Ekonomi yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu atas ilmu dan teladan yang diberikan kepada penulis semala belajar di Universitas Hasanuddin. Tidak lupa juga Bapak dan Ibu staf administrasi yang telah memberi pelayanan yang baik guna menjamin kelancaran studi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh tim penguji dan penilai, yakni Dr. H. Rachmad Budi Suharto, SE., S.H., M.Si, sebagai penguji dan penilai eksternal; dan Prof, Dr. Rahmatia, MA., Dr. Fatmawati, SE., M.Si, Dr. Sri Undai Nurbayani, SE.,M.Si., dan Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., masing-masing sebagai penguji dan penilai internal. Atas atas segala perhatian, pertanyaan, sanggahan, kritikan, dan saran, dan dengan segala pengetahuan dan motivasinya selama proses ujian berlangsung demi penyempurnaan disertasi ini, sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih.

6. Prof. Dr. Hamzah, M.Ag, selaku Rektor institut Agama Islam Negeri Sorong Papua Barat, Bapak Dr. Rusdi Rasyid, Sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Hasbullah, Ph.D Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan IAIN Sorong, Kepala Biro AUAK Dr. H. Arsyad Ambo Tuo. M.Pd., Dr. Bambang Sunatar, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dakwah, Bapak Dr. H. Surahman Amin, Lc., MA., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah serta rekan-rekan sejawat di IAIN Sorong Papua Barat yang telah memberi dukungan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin
7. Secara khusus penulis dedikasikan capaian ini kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda H. M. Said Salam dan ibunda Hj. Johariah yang telah mendidik dan menanamkan nilai-nilai luhur dengan penuh kasih sayang. Begitupula kepada mertua Bapak Udis , dan Ibu Maemunah . Tanpa doa dan didikan Beliau, mustahil bagi penulis mampu melintasi berbagai rintangan, khususnya dalam menyelesaikan disertasi ini.
8. Suami Tercinta Ir. H. Rokhman, ST, MM., MT., IPM., Asean Eng., dan anak- anak tersayang, Muh. Athar Al Ayubi A.R, ST., dan Nurul Ainun Nissa. Terima kasih atas kesabaran dan doa yang selalu dipanjatkan. Semoga capaian yang penulis peroleh saat ini lebih mengukuhkan kita dalam meraih masa depan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah..

9. Kakak dan Adik-adikku terkasih: Ilyas Salam, SKM, MSi, Amrullah, S.Kep., Hasmira Rustam, S.Kep., Hasmianti, S.Keb, Nirma Alam beserta keluarga. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan, semoga Allah SWT. selalu memberi hidayah dan keberkahan hidup bagi kita.
10. Teman-teman di Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unhas angkatan 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan imbalan atas amal dan bantuan Bapak dan Ibu berikan secara tulus. Akhirnya, tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah-rabbil alaamiin. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Makassar, 24 Juli 2023

Penulis,

Hasbiah

Abstrak

HASBIAH. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat (dibimbing oleh Basri Hasanuddin, Madris, dan Anas Iswanto Anwar).

Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan. Terlebih lagi kesejahteraan merupakan salah satu tujuan nasional bagi bangsa Indonesia, Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Otsus dan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat melalui Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan menggunakan data pada tahun 2013 sampai dengan 2021. Model analisis yang digunakan adalah Model Struktural dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Otsus berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui investasi. Di sisi lain, Dana Otsus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan APBD berpengaruh positif terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi, sementara APBD terhadap Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh negatif. .

Kata Kunci : *Otsus, APBD, Kesejahteraan Masyarakat, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi*

HASBIAH. The Influence of Government Expenditure on People's Welfare in the Provinces of Papua and West Papua (supervised by Basri Hasanuddin, Madris, and Anas Iswanto Anwar).

Improving people's welfare is the most important part in the development process. Moreover, welfare is one of the national goals for the Indonesian nation. The aim of this research is to find out effect of the Special Autonomy Fund and the Regional Budget on people's welfare through Investment and Economic Growth in the Provinces of Papua and West Papua Province, This using data from 2013 to 2021. Model The analysis used is the Structural Model using the SPSS 25 application. The results show that the Special Autonomy Fund has a negative effect on people's welfare, both directly and through investment. On the other hand, the Special Autonomy Fund has a positive influence on economic growth. Meanwhile, APBD has a positive effect on Investment and Economic Growth, while APBD has a negative effect on Community Welfare. .

Keywords: Special Autonomy, APBD, Community Welfare, Investment, Economic Growth

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan Penelitian	26
1.4 Kegunaan Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	29
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	66
2.3 Tinjauan Empiris	77
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	86
3.1 Kerangka Konseptual.....	86
3.2 Hipotesis	89
BAB IV METODE PENELITIAN	92
4.1 Rancangan Penelitian	92
4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	92
4.3 Jenis dan Sumber data	92
4.4 Instrumen Penelitian	93
4.5 Model Analisis.....	93
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	99

BAB V HASIL PENELITIAN.....	102
5.1 Analisis Deskriptif.....	102
5.2 Analisis Hasil Penelitian.....	118
BAB VI PEMBAHASAN HASIL	130
6.1 Hasil Pengaruh Langsung.....	130
6.2 Pengaruh Tidak Langsung Otonomi khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Investasi & Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Pada Provinsi Papua dan Papua Barat.....	163
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	172
7.1 Kesimpulan	172
7.2 Saran	176
DAFTAR PUSTAKA.....	180
LAMPIRAN	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua & Papua Barat Tahun 2010 – 2018	7
Gambar 1.2 Tren Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat Tahun 2002-2019	10
Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah Papua Dan Papua Barat Tahun 2017-2019 (Milliar Rupiah)	14
Gambar 3.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian	89
Gambar 4.1 Kerangka Analisis	94
Gambar 5.1 Diagram Hasil Analisis Signifikansi Antar Variabel Berdasarkan Model Simultan	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan wilayah Papua dan Papua Barat tahun 2015-2020 Triwulan II	16
Tabel 1.2 Realisasi Investasi Swasta Provinsi Papua & Papua Barat Tahun 2012-2021	19
Tabel 5.1 Data IPM Papua dan Papua Tahun 2017-2021	103
Tabel 5.2 Data IPM Papua dan Papua Barat Tahun 2017-2021	104
Tabel 5.2 Data Produc Domestic Regional Bruto PDRB Papua dan Papua Barat tahun 2019-2021 (Dalam Milyar).....	105
Tabel 5.3 Data Pembentukan Modal Tetap Bruto Papua dan Papua Barat Tahun 2019-2021 (Dalam Satuan Juta Rupiah)	108
Tabel 5.4 Komposisi Dana Otsus Provinsi Papua Berdasarkan Kota/Kab. Periode 2019-2021	114
Tabel 5.5 Data Dana Otsus Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kota/Kab Periode 2019-2021	115
Tabel 5.6 Pengaruh Langsung Variabel Dana Otsus, APBD terhadap I, PDRB dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat	118
Tabel 5.7 Pengaruh Tidak Langsung Variabel Otsus, APBD terhadap Investasi, PDRB dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Tahun 2013-
20121

Lampiran 2 Data Jumlah Penduduk Proinsi Papua Tahun 2013-2021

Lampiran 3 Data Dana Otsus Papua dan Papua Barat

Lampiran 4 Data yang Diolah

Lampiran 5 Data yang sudah Di Ln

Lampiran 6 Hasil Regresi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan nasional bagi bangsa Indonesia. Dalam paradigma pembangunan ekonomi perubahan kesejahteraan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan rakyat juga semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Keadaan kesejahteraan merupakan indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*) (Sen, 2008). Yang paling berhubungan dengan dengan sistem kesejahteraan masyarakat bagi para *homeless* ini adalah pemerintah, dengan memberikan perlindungan hidup jaminan perlindungan terhadap *standart* hidup untuk semua dan tidak boleh ada diskriminasi, dan orang yang hidup miskin dapat menuntut pertolongan bantuan dari pemerintah.

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron, 2012). Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan (Widyastuti, 2012).

Komitmen Pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tindak lanjut dari Inpres tersebut, dirumuskannya *quick wins* dalam membangun SDM Papua yang lebih berkualitas, kompeten, dan unggul untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Kehadiran Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini merupakan bukti komitmen Pemerintah dalam melakukan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ada 7 (tujuh) sektor strategis yang menjadi program *quick wins* 2021-2022 untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua yaitu; pertama adalah di bidang pendidikan, melalui Papua Pintar, kedua yaitu Papua Sehat sebagai

solusi atas permasalahan sulitnya akses masyarakat Papua terhadap fasilitas dan layanan kesehatan, peningkatan RSUD, pengembangan infrastruktur Papua, penguatan puskesmas, dan penampungan anak terlantar, ketiga adalah Papua Mandiri berupa wujud pengembangan komoditas unggulan yang mencakup kawasan wisata dan pengembangan usaha masyarakat Papua dengan Penetapan Sail Teluk Cenderawasih 2023, wisata terpadu, balai ekonomi desa, petani millennial, serta pengembangan balai latihan kerja dan sekolah vokasi,

Kemudian Keempat adalah Papua Tersambung, merupakan upaya konektivitas jalur di Papua yang sifatnya mempermudah akses komunikasi dan transportasi bagi masyarakat Papua. *Major project* jembatan udara, peningkatan jaringan dari Palapa Ring Timur, *major project* trans Papua ke sentra ekonomi, dan pembangunan beberapa depo di sentra ekonomi, Kelima adalah Papua Terang, upaya Pemerintah di dalam memberikan akses listrik di seluruh pelosok tanah Papua, serta bekerja sama dalam membangun energi baru terbarukan, keenam adalah Papua Berkarya, menjadi langkah pemerintah dalam memajukan sumberdaya manusia Papua untuk mampu berkarya di industri nasional, ketujuh adalah Papua Bangga, mengangkat aspek sosial-budaya Papua yang menjadi ciri khas tanah Papua, pembangunan rumah budaya Papua, pusat diklat berbasis lembaga keagamaan, manajemen talenta Papua, dan industri *bio creative*.

Indikator yang bisa mengukur kualitas manusia disuatu daerah yaitu dengan cara Indeks Pembangunan Manusia. Jadi IPM di suatu daerah akan

meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut (kacaribu, 2013).

UNDP (United Nation Development Programme) memberikan ukuran terhadap keberhasilan pembangunan manusia yakni dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM merupakan Indeks Komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak yang tertuang dalam Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*). Sejak otonomi daerah, maka setiap daerah diharapkan untuk mengetahui ukuran IPM daerahnya sendiri baik untuk keperluan perencanaan maupun untuk evaluasi khususnya dalam mengetahui perkembangan dan sebaran hasil-hasil pembangunan bidang manusia.

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kualitas manusia dalam suatu daerah yang berguna untuk memajukan daerah tersebut. Kualitas hidup masyarakat di suatu negara atau daerah tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian (Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020).

Salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat. Provinsi ini memiliki sumber daya mineral yang bernilai tinggi, hasil hutan yang berlimpah, sumber daya sungai untuk pembangkit tenaga listrik yang besar. Namun, kekayaan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Kekuasaan beberapa pihak asing serta belum mampunya penduduk lokal dalam mengelola aset lokal Papua mengakibatkan angka kemiskinan. Indeks Daya Saing Infrastruktur sendiri dibangun oleh indikator kualitas jalan, ketersediaan air minum yang layak, kepemilikan rumah, indeks kawasan permukiman tidak kumuh dan perkotaan, serta kesediaan akses sanitasi yang layak.

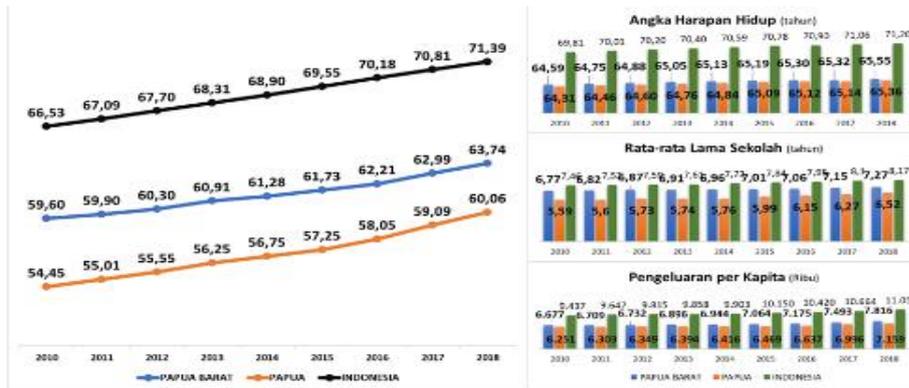
Di antara lima indikator ini, Provinsi Papua dan Papua Barat perlu menggarisbawahi tiga indikator, yaitu kualitas jalan, ketersediaan air minum yang layak, dan akses sanitasi. Rendahnya indeks tersebut serta faktor banyaknya penduduk miskin yang ada di Papua menjadi penyebab rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika dibandingkan dengan angka nasional, maka akan kontras terlihat *gap* yang relatif jauh. Ketertinggalan Papua terasa nyata apabila dilihat berdasarkan data-data yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu kebijakan pembangunan di Papua merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Proyek ini tidak hanya berbicara mengenai Trans Papua, tetapi juga mencakup usaha penyediaan listrik dan pembangunan infrastruktur lainnya. Tujuan pengadaan proyek ini adalah membuka isolasi ekonomi yang ada di Papua sehingga masyarakat Papua

dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang dapat dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup (diukur dengan pendapatan yang telah disesuaikan).

Pembangunan manusia di Papua Barat terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2012, status pembangunan manusia Papua Barat meningkat dari level “rendah” menjadi “sedang”. Selama 2010-2021, IPM Papua Barat rata-rata meningkat sebesar 0,79 persen pertahun, dari 59,60 pada tahun 2010 menjadi 65,26 pada tahun 2021. Tidak hanya menyebabkan perlambatan pada tahun 2020, pandemi COVID-19 rupanya masih menjadi penyebab utama perlambatan IPM Papua Barat pada tahun 2021 yang hanya meningkat pada kisaran 0,26 persen (atau hanya meningkat 0,17 poin).

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua & Papua Barat Tahun 2010 – 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Papua, 2020

Grafik diatas menunjukkan bahwa adanya tren kenaikan IPM pada Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2011-2018 yang juga sejalan dengan nasional. Namun IPM Provinsi Papua dan Papua Barat selalu terbawah secara nasional. IPM pada Provinsi Papua tidak mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD pada tahun 2018. Perlu diperhatikan untuk Provinsi Papua Barat dengan tingkat pertumbuhan peringkat 29 dari 34. Terkait dengan lambatnya pertumbuhan IPM pada Provinsi Papua Barat, perlu diperhatikan pada dimensi Pendidikan dikarenakan tingkat pertumbuhan Real Time System (RTS) pada Provinsi Papua Barat berada pada posisi kedua Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (AKN) 13 terbawah. Untuk itu hendaknya penggunaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat dapat lebih dialokasikan untuk usaha perbaikan sektor pendidikan.

Rendahnya IPM pada Provinsi Papua dan Papua Barat ini juga tidak lepas dari permasalahan tingginya disparitas IPM antar Kabupaten/Kota. Pada Provinsi Papua Barat, IPM Kota Sorong sebesar 77,35 sedangkan pada Kabupaten Tambora sebesar 51,95. Pada Provinsi Papua, IPM Kota Jayapura sebesar 79,58, sedangkan pada Kabupaten Nduga hanya sebesar 29,42. Data ini hendaknya menjadi basis kebijakan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam usaha meningkatkan IPM terutama pada daerah dengan IPM kecil (Akuntabilitas Keuangan Negara , 2020).

Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal istilah otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Dalam Konteks negara kesatuan, asas desentralisasi merupakan pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Dimana otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga melakukan pengembangan yang disesuaikan wilayah masing-masing. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

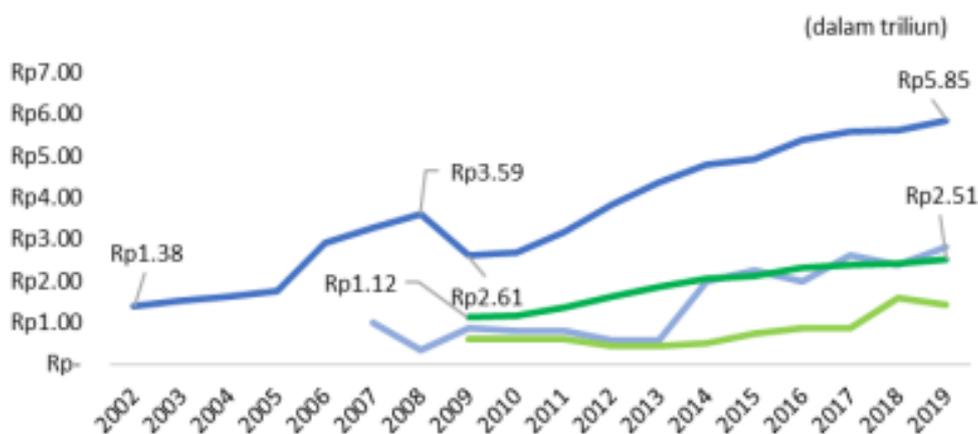
Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya; pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom; kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah; lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (Smith dalam Domai, 2011).

Kebijakan otonomi daerah dalam penerapannya adalah memberikan kewenangan mengelola dan mengurus daerah, juga kewenangan fiskal berupa bantuan (*grant*) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berarti bahwa kewenangan otonomi daerah yang diikuti dengan kewenangan fiskal dalam membiayai pembangunan yang merupakan salah satu alat yang dapat menciptakan peningkatan penyediaan layanan yang lebih efisien (Steffensen, 2007).

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan belanja secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja oleh pemerintah daerah pada prinsipnya adalah bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (Sutrisna, 2021).

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua mulai diberikan pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2 mengatur bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2 % (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Gambar 1.2 Tren Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat Tahun 2002-2019



Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2020)

Dari grafik 1.2 menunjukkan bahwa, secara kumulatif jumlah dana otsus yang telah diterima oleh Provinsi Papua Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi Papua mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2002-2020. Untuk Provinsi Papua Barat Realisasi Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dari tahun 2009 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya .

Tujuan dari otonomi khusus adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang perlu dibarengi dengan peningkatan pembangunan, dimana apabila pembangunan meningkatkan maka akan memberi nilai tambah bagi daerah tersebut dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, untuk itu pendapatan dan pengeluaran berupa belanja yang digunakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pasal 34 ayat (3), dana otsus bertujuan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dalam ketentuan mengingat pada UU tersebut, disebutkan bahwa mengurangi kesenjangan, meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan rakyat khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan hal-hal yang menjadi cita-cita dari kebijakan dana otsus. Komitmen tersebut dipenuhi oleh pemerintah dengan disalurkan Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2011-2015, rata-rata kontribusi Dana Otonomi Khusus pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah 47,11 persen. Proporsi tersebut merupakan terbesar dalam Pendapatan Provinsi Papua, bahkan jarak antara proporsi terbesar kedua yaitu Dana Alokasi Umum lebih dari dua kali lipat yaitu dengan proporsi 20,14%. Begitu dominannya proporsi Dana Otonomi Khusus dalam APBD seharusnya menjadi pendorong besar dalam perkembangan indikator-indikator kesejahteraan (Akuntabilitas Keuangan Negara, 2018).

Efektivitas desentralisasi fiskal khususnya di negara-negara berkembang masih dalam situasi ketimpangan menurut Tanzi (1995). Pada kondisi yang tidak seimbang (*unbalance*) antara penggunaan anggaran yang tidak optimal hasil pembangunannya dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kegagalan pasar (*market failure*). Transfer dana bantuan pemerintah pusat kepada daerah memberikan manfaat yang sangat besar namun pengaruhnya disisi lain juga berkontribusi terhadap kesenjangan pembangunan antar daerah (Shah, 1994 dan Hamid, 2005).

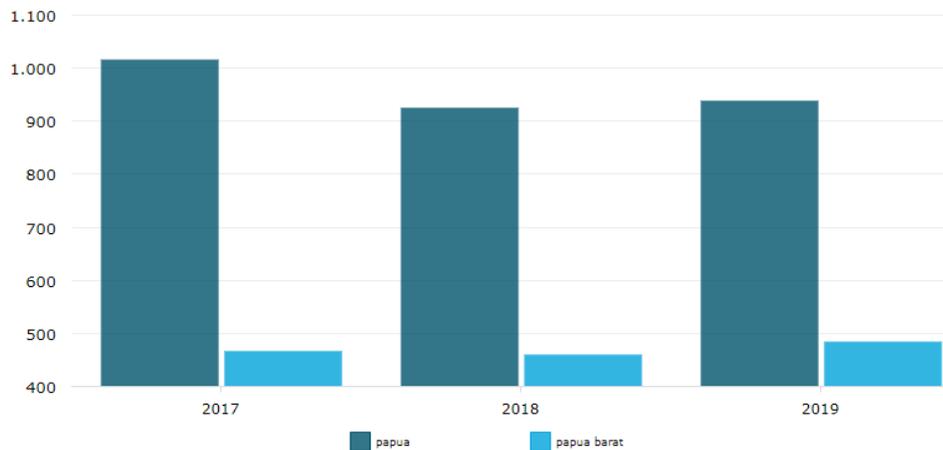
Kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dinegara berkembang, seringkali terhalang oleh kurangnya pemerataan antara daerah satu dengan daerah lain, rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan faktor yang mendukung timbulnya kemiskinan. APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. APBD diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah yang dimiliki (Nurhidayah, 2018).

Suatu daerah untuk dapat melaksanakan suatu pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup. Hal ini untuk menghindari ketergantungan

yang semakin besar bagi daerah pada pemerintah pusat atau daerah tingkat atas nya. Hal ini tentu tak bisa terjadi apabila proses pengelolaan sumber-sumber pendapatan dari sector ekonomi potensial tidak dikelola dengan baik.

Untuk itu pemerintah daerah dituntut bukan hanya bisa menjalankan kewenangan yang diberikan namun juga harus bisa menjalankan tanggung jawab sebagai sebuah daerah otonomi yakni meningkatkan kemandiriannya dalam bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sedikit demi sedikit mengurangi persentase pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat. Masih kurangnya tingkat kemandirian pemerintah daerah dan masih besarnya factor ketergantungan kepada pemerintah pusat yang masih amat besar, sehingga banyak kebijakan pemerintah pusat dan pengelolaan potensi sumber keuangan harus diikuti oleh pemerintah daerah, serta sumber-sumber keuangan potensial yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat (Yani, 2002). Dalam hubungannya sendiri, dana perimbangan merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam mencukupi anggaran belanjanya untuk setiap periode yang berjalan, hubungan ini sendiri bersifat (*Intergovernmental fiscal relation system*).

Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah Papua Dan Papua Barat Tahun 2017-2019 (Milliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik (Papua Dalam Angka 2020)

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Nilai ini didapatkan dari pajak daerah, redistribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lain yang sah.

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah maka pengeluaran pemerintah daerah terhadap belanja modal akan semakin besar dan bisa meningkatkan kesejahteraan di suatu daerah. Sama halnya dengan PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kedaerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bias mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah tersebut untuk membelanjakan asset sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi daerah secara umum menjadi Indikator keberhasilan pembangunan di daerah secara umum. Hal ini berhubungan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang terus meningkat.

Peningkatan ini diharapkan bisa dapat memberikan *trickle-down effect*. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi sudah sewajarnya menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sering dijadikan ukuran terbaik untuk mengukur kinerja perekonomian (Mankiw, 2013). Terdapat tiga cara untuk menghitung PDB. Pertama, dengan menjumlahkan nilai akhir produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Kedua, dengan menjumlahkan pengeluaran agregat, yaitu jumlah dari pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi, pembelian pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor di kurang impor (net export). Ketiga, dengan menjumlahkan seluruh pendapatan faktor produksi yang diterima rumah tangga dari perusahaan (Krugman & Wells, 2011).

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan

besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB, dapat digunakan dua pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut .

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan wilayah Papua dan Papua Barat tahun 2015-2020 Triwulan II (Dalam Persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020-Tr II
Papua	7,35	9,14	4,64	7,37	-15,72	4,52
Papua Barat	4,15	4,52	4,02	6,25	2,66	0,53

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Pertumbuhan ekonomi provinsi di wilayah Papua, rata-rata tumbuh positif selama periode 2015-2019, kecuali di Propvinsi Papua pada tahun 2019 berkontraksi dengan angka pertumbuhan -15,72 persen. Perkembangan ekonomi pada tahun 2020 Triwulan II seiring dengan krisis pandemi Covid 19, Provinsi Papua Barat dan Papua masih mampu tumbuh positif, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 4,52 persen, dan 0,53 persen sektor-sektor yang memberikan andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 Triwulan , yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, sector administrasi pemerintahan, dan sector konstruksi. Sektor lain yang memberikan andil cukup besar adalah sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor informasi dan komunikasi.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi hendaknya Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk kegiatan di sektor yang memberikan daya ungkit tinggi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi penduduknya semakin meningkat, dimana modal dan tenaga kerja merupakan dua faktor produksi utama yang terdapat di dalam model pertumbuhan Solow. Kewenangan daerah dalam menggali sumber keuangan yang ada di daerah dengan mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dengan demikian ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber keuangan, karena dengan adanya suatu pembangunan daerah, maka akan ada pembangunan ekonomi .

Pembentukan Modal Total Bruto merupakan salah satu komponen penyusun PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang merepresentasikan besaran investasi. Komponen lainnya adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan lembaga nonprofit, perubahan inventori, dan aktivitas ekspor impor. Sementara itu, adanya peningkatan *share* Pembentukan Modal Total Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dari waktu ke waktu adalah gejala yang diharapkan. Sebab, kenaikan investasi akan menyerap banyak tenaga kerja, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi.

Investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Sasana, 2008).

Tabel 1.2 Realisasi Investasi Swasta Provinsi Papua & Papua Barat
Tahun 2012-2021

Tahun	PMA Papua		PMA PaPua Barat	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
2012	21	1,202,432.6	18	32,035.1
2013	87	2,359,999.7	67	54,156.4
2014	42	1,260,603.5	42	153,347.9
2015	133	897,048.6	96	258,607.5
2016	169	1,168,433.7	126	514,490.3
2017	135	1,924,108.2	87	84,672.5
2018	102	1,132,268.7	70	286,862.0
2019	127	940,960.9	64	46,20.7
2020	184	567,671.3	121	10,585.0
2021	95	1,489,073.8	52	32,502.0

Sumber: National Single Window For Investment, BKPM, 2021

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa investasi di Provinsi Papua Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan capaian realisasi investasi yang terus meningkat, dimana pada tahun 2018, realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Provinsi Papua Barat memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Investasi di Provinsi Papua juga mengalami kenaikan.

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan, investasi pada hakikatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Urgensi tentang pembentukan modal di daerah mendapat perhatian dan penekanan oleh Pagkey (2018) yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*regional capital formation*). Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (M. Sari, Syechalad, & Sabri Abdul Majid, 2016).

Menurut Sajafii, 2009 dalam (I Gusti Ayu Putri Wahyuni) Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi, Investasi dapat menjadi titik tolak ukur bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dimasa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru

bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Sampai saat ini potensi tersebut belum dapat dikelola secara maksimal. Untuk itu investasi merupakan instrumen penting dalam perekonomian sumber pembiayaan pembangunan daerah. investasi berpengaruh pada peningkatan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) daerah disamping sektor konsumsi masyarakat, ekspor dan impor. Pengaruh investasi dikaitkan dengan kemampuan mengelola sumber daya alam, maka akan dihadapkan dengan modal dan teknologi. Investasi di daerah memberikan *multiplier effect* pada akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan suatu negara adalah investasi. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan modal dan investasi yang besar, tidak hanya dari Pemerintah dan swasta nasional namun termasuk dari luar negeri (asing.) Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dan Investasi Asing (PMA) akan menciptakan nilai berupa peralatan, mesin-mesin dan bangunan yang akan mendorong peningkatan produktivitas tinggi yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Investasi juga memiliki peran kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi. Jhingan (2003) sebaliknya investasi yang rendah akan menghambat bagi suatu daerah dalam menghadapi persaingan secara regional maupun global.

Desentralisasi pembangunan sebagai akibat kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi pada ketidak seragaman pelaksanaan dan hasil pembangunan di masing-masing provinsi. Setiap provinsi akan mempunyai strategi tersendiri dalam membangun daerahnya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Kebijakan pembangunan di setiap provinsi akan berbeda, khususnya kebijakan dibidang pembangunan ekonomi (investasi dan pertumbuhan ekonomi), dan ketenagakerjaan (penyerapan tenaga kerja), namun tujuan akhirnya adalah sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakta yang ditemui adalah IPM secara nasional maupun provinsi masih rendah, yaitu masih pada kategori Medium Human development. Relatif rendahnya capaian IPM tersebut berarti telah terjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tampak bahwa ketersediaan anggaran pemerintah mengalami peningkatan, dan disertai pula dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota cenderung meningkat setiap tahun, dikarenakan pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam proses pembangunan dilihat dari perkembangan kegiatannya, tampak bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten/kota terus diupayakan meningkat disegala bidang.

Peningkatan cukup signifikan terjadi pada pengeluaran pemerintah pada sektor publik terutama untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kondisi seperti ini maka perlu dilakukan suatu penelitian, apalagi

Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadikan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai sektor strategis yang menjadi dasar pembangunan. Dana otonomi khusus (Otsus) yang diberikan ke Provinsi Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu dua puluh (20) tahun terakhir ini yang menggambarkan Papua mendapatkan pemihakan yang signifikan dibandingkan provinsi lain, tapi belum mampu menekan ketertinggalan dalam mengurangi persentase penduduk miskin dengan provinsi lain secara nasional.

Pada tahun 2010, peringkat provinsi Papua berada pada peringkat terakhir sedangkan Papua Barat di peringkat 32 (tiga puluh dua) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia. Kondisi ini masih tetap sama dimana dari data BPS tahun 2020 Provinsi Papua dan Papua Barat menduduki urutan terakhir dan kedua dari terbawah provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, Papua memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 26,80%, sedangkan Papua Barat menempati urutan ke dua dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 21,70%. Walaupun persentase penduduk miskin Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, tingkat kemiskinan kedua Provinsi ini selalu paling tinggi dibanding provinsi lainnya (BPS, 2021). Kesenjangan yang seharusnya bisa ditutupi dengan adanya Dana Otsus belum terlihat dalam hasil kualitas kesejahteraan masyarakat Papua.

Selain IPM dan tingkat kemiskinan, berbagai indikator tingkat kesejahteraan yang lain seperti tingkat kesenjangan pendapatan (Rasio

Gini), tingkat pengangguran terbuka, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat masih rendah dibanding dengan provinsi lainnya. Oleh karena itu tindakan afirmasi masih diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat dampak pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, serta melihat bagaimana Investasi dan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) dalam memediasi hubungan antara variabel independen (Otsus dan APBD) terhadap variabel kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari beberapa gambar dan tabel yang tercantum, memberikan gambaran kondisi perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat yang mana kondisi tersebut ada yang berfluktuasi dan ada juga yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dengan kondisi perekonomian Provinsi Papua dan Papua Barat seperti yang terlihat pada gambar dan tabel di atas, penulis juga tertarik terhadap teori dari beberapa ahli ekonomi yang telah mengembangkan beberapa teori tentang keterkaitan variabel dalam penelitian ini.

Beberapa bukti empiris yang menjadi referensi dilakukannya penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Arif (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur belum mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh SO Shavira (2021) hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Prima Rosita (2019), pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat, yang hasilnya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya penelitian lainnya tentang investasi swasta memasukkan unsur pengeluaran pemerintah sebagai faktor penentu besar kecilnya investasi swasta di suatu negara Qayyum (2008). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan investasi swasta. Hurhidayah (2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji pengaruh pengeluaran pemerintah melalui Otonomi Khusus dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Otonomi Khusus berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui:
 - a. Investasi.
 - b. Produc Domestic Regional Bruto (PDRB).
 - c. Investasi dan Produc Domestic Regional Bruto (PDRB).
2. Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui:
 - a. Investasi.
 - b. Produc Domestic Regional Bruto (PDRB).
 - c. Investasi dan Produc Domestic Regional Bruto (PDRB).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Otonomi Khusus berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui :
 - a. Investasi.
 - b. Produc Domestic Regional Bruto (PDRB).
 - c. Investasi dan Produc Domestic Regional Bruto (PDRB).

2. Untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui:
 - a. Investasi.
 - b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
 - c. Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran yang akan memberi manfaat yang terkait secara langsung dengan penelitian yang relevan dengan penelitian yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan manfaat dan implikasi baik secara teoritis keilmuan dan bidang ilmu yakni pemahaman secara makro keterkaitan antara Dana otonomi Khusus, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah daerah membantu dalam mengambil kebijakan dalam membantu memajukan pembangunan ekonomi melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai realisasi pengurangan permasalahan pengangguran dan terciptanya

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan suatu wilayah.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ataupun menjadi gap penelitian bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki permasalahan penelitian yang relevan .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Masyarakat sebagai sasaran penerima kesejahteraan harus mendukung upaya pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab atas peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Menurut Sunarti (2012), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material,maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan

kebutuhan jasmani,rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Menurut Liony (2013). Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera.

Kesejahteraan merupakan salah satu konsep dalam ilmu ekonomi yang sering menjadi bahan kajian dan penelitian. Teori kesejahteraan (*Welfare Theory*) pada umumnya mengadopsi dari teori Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* (1776), bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. kebutuhannya.

Kecenderungan individu untuk selalu berusaha memuaskan keinginannya, maka kesejahteraan akan dicapai pada saat kepuasan mencapai tingkat optimum. Pencapaian tingkat kepuasan inilah yang menjadi kajian ilmuan ekonomi. Berbagai pendekatan dapat menjelaskan bagaimana individu atau rumah tangga dapat dikatakan "sejahtera" atau "puas", diantaranya adalah pendekatan marginality, utility, efisiensi pasar, dan opportunity cost (Case, 2003).

Menurut Case (2003) tentang kesejahteraan dalam pendekatan utilitas, dengan menelusuri kajian literatur terkait yang kesejahteraan rumah tangga keluarga. Dalam konteks keluarga (family) kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana keluarga mencapai tingkat kepuasan maksimal. Individu dalam suatu keluarga akan puas atau sejahtera jika keinginannya dapat terpenuhi oleh orang tua sebagai kepala keluarga, individu juga akan merasa sejahtera jika terbentuk hubungan harmonis dalam keluarga.

Rettig dan Leichtentritt (1999) mengembangkan tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan, yakni dengan pendekatan teori Lingkungan manusia (*Human Ecological System Theory*), Teori sumberdaya (*Resources Theory*) dan teori perilaku (*Facet Theory Behavioral*). Dalam pendekatan human ecological interaksi dan hubungan ketergantungan manusia dengan lingkungan fisik, biologis, sosial termasuk hal-hal yang berkaitan dengan transformasi energi dan sumberdaya informasi. Dalam teori sumberdaya kesejahteraan keluarga tersebut dihitung dengan kenyamanan keluarga, informasi yang diperoleh, kepemilikan sejumlah uang, barang dan jasa. Sementara itu dalam teori Facet teori, kesejahteraan keluarga dihitung dengan skala yang beragam dengan persepsi individu dalam keluarga tentang kesejahteraannya.

Pendekatan Marginality, lebih cenderung menekankan pada upaya rumah tangga menambah unit barang dan jasa yang dikonsumsi untuk mempertinggi kesejahteraan, setiap penambahan satu unit barang dan jasa

yang dihabiskan kegunaannya maka akan bertambah kepuasan seseorang sampai pada titik tertentu. Termasuk juga pada perilaku produsen, setiap input yang ditambahkan akan meningkatkan produk yang akan dihasilkan sehingga sampai pada titik tertentu.

Pendekatan efisiensi pasar, sebenarnya lebih cenderung pada bagaimana pasar bisa menciptakan surplus produsen dan surplus konsumen. Nicholson (2002) menjelaskan bahwa kepuasan atau kesejahteraan rumah tangga khususnya pada rumah tangga konsumen, kesejahteraaannya dapat diukur dengan surplus konsumen. Dimana ukuran nilai lebih yang diterima oleh konsumen dari suatu barang yang dibeli melebihi dari yang mampu dibayar, atau harga dipasar lebih rendah dibandingkan dengan daya beli konsumen. Sementara itu produsen mendapatkan surplus ketika nilai lebih yang diterima oleh produsen dari suatu produk melebihi dari biaya oportunitas (opportunitiy cost) yang muncul karena memproduksi barang itu. Mencerminkan berapa biaya yang secara sukarela bersedia dibayar oleh para produsen demi mendapatkan hak menjual suatu produk pada harga pasar yang berlaku. Dalam pendekatan utilitas ukuran kesejahteraan rumah tangga ditentukan oleh anggaran yang dimiliki oleh individu dan rumah tangga, semakin tinggi garis anggaran maka semakin tinggi kemungkinan kepuasan rumah tangga dalam melakukan konsumsi.

Hampir senada dengan itu, Pindyk (2005) menjelaskan surplus konsumen diartikan sebagai selisih dari berapa yang tersedia untuk dibayar

oleh konsumen untuk suatu barang dengan berapa yang sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika membeli barang tersebut. Dan surplus produsen didefinisikan sebagai jumlah semua unit yang diproduksi dari selisih antara harga pasar barang tersebut dan biaya marjinal produksinya.

Sementara itu dalam konteks lokal di Indonesia Cahyat (2007) mendefinisikan kesejahteraan tersebut dalam tiga pengertian yakni: (1) Kesejahteraan subjektif (*subjective wellbeing* atau disingkat SWB), (2) Kesejahteraan inti (kebutuhan, seperti kekayaan materi, pengetahuan dan kesehatan), dan (3) Lingkungan pendukung (konteks). Perasaan kesejahteraan subjektif adalah kumpulan perasaan seseorang; bisa berupa perasaan sejahtera, rasa bahagia, rasa dihormati, rasa diakui, rasa miskin, rasa serba kekurangan, dan perasaan-perasaan sejenisnya. Kesejahteraan inti terdiri dari kebutuhan dasar yang bersifat material (kebendaan) maupun bukan material, yang mencakup aspek gizi dan kesehatan, pengetahuan, dan kekayaan materi. Lingkungan pendukung (konteks) adalah lingkungan kehidupan yang mempengaruhi kesejahteraan inti.

Menurut Pareto bahwa kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*Welfare Economics*), (Swasono, 2005). Boulding dalam Swasono mengatakan bahwa pendekatan yang memperkuat konsepsi yang telah dikenal sebagai sosial optimum yaitu *paretion optimum* (optimalitas ala Pareto dan Edeworth), dimana efisiensi

ekonomi mencapai sosial optimum bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *Classical Utilitarian*, *Neoclassical Welfare Theory* dan *New Contractarian Approach* (Albert dan Hahnel dalam Darussalam 2005). Pendekatan Classical Utilitarian menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah.

Ekonomi kesejahteraan dimulai dengan penerapan teori utilitas dalam ekonomi makro. Utilitas mengacu pada nilai yang dirasakan terkait dengan barang atau jasa tertentu. Dalam teori mikroekonomi arus utama, individu berusaha memaksimalkan utilitas mereka melalui tindakan dan pilihan konsumsi mereka, dan interaksi pembeli dan penjual melalui hukum penawaran dan permintaan di pasar kompetitif menghasilkan surplus konsumen dan produsen.

Perbandingan ekonomi mikro surplus konsumen dan produsen di pasar di bawah struktur dan kondisi pasar yang berbeda merupakan versi dasar dari ekonomi kesejahteraan. Versi paling sederhana dari ekonomi kesejahteraan dapat dianggap sebagai pertanyaan, Struktur pasar dan pengaturan sumber daya ekonomi mana di seluruh individu dan proses produktif yang akan memaksimalkan jumlah utilitas total yang diterima oleh semua individu atau akan memaksimalkan total surplus konsumen dan produsen di semua pasar. Ekonomi kesejahteraan mencari negara

ekonomi yang akan menciptakan tingkat kepuasan sosial tertinggi secara keseluruhan di antara para anggotanya.

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Thomas dkk, (2005) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

Todaro (2003) secara lebih spesifik mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan W (welfare) dengan persamaan berikut: $W = W(Y, I, P)$, dimana Y adalah pendapatan perkapital, I adalah ketimpangan, dan P adalah kemiskinan absolute. Ketiga variabel ini mempunyai signifikan yang berbeda-beda, dan selayaknya harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan dinegara-negara berkembang. Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan diatas, diasumsikan bahwa

kesejahteraan Masyarakat berhubungan positif dengan pendapatan perkapital, namun berhubungan negative dengan kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum merupakan tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang selama ini berkembang dan digunakan oleh beberapa negara senantiasa mempergunakan ukuran yang bersifat multi-dimensional. Hal ini dapat dipahami bahwa isu kesejahteraan masyarakat memiliki kompleksitas persoalan yang sangat beragam, dan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan satu dimensi/variabel (single dimension) saja. Terdapat beberapa konsep pengukuran kesejahteraan yang digunakan oleh negara maju di dunia saat ini yaitu : Human Development Index (HDI), Gross National Happiness, Index Quality Life, Prosperity Indeks, The Better Life Index, The Economic Well-being Indeks, Index of Happiness (indeks kebahagiaan), Human Wellbeing Index, Social Progress Index (Marzuki, 2017)

Konsep pengukuran Human Development Indeks (HDI) yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna mendukung

konsep pembangunan berkelanjutan. Inti dari konsep kesejahteraan adalah melakukan “ *social investment*” untuk menghasilkan sumber daya manusia sebagai motor penggerak utama pembangunan berkelanjutan. Indeks ini berfungsi untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia di suatu negara dengan 4 (empat) indikator yaitu: (1) angka melek huruf; (2) angka partisipasi pendidikan; (3) angka harapan hidup; (4) PDB perkapita (daya-beli). Jadi IPM melihat konsep kesejahteraan secara parsial, yaitu dari sudut pandang pendidikan, kesehatan, dan tingkat pengeluaran riil untuk memenuhi kebutuhan perindividu (Osberg & Sharpe, 2003; Setiawan & Hakim, 2013)

Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menilai capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai

pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2020).

2.1.2 Investasi

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu penambahan modal. Penambahan modal ini berupa investasi dan tabungan. Di satu sisi tabungan domestik rendah sedangkan, di sisi lain kebutuhan dana untuk membiayai investasi besar (meningkat terus setiap tahun mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pasar). Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tabungan dan investasi: $S - I < 0$ ($S < I$). Ini berarti negara tersebut mengalami investment-saving gap atau I-S gap positif (atau S-I gap negatif). Di Indonesia seperti banyak di negara berkembang lainnya selisih ini ditutup dengan arus modal asing, mulai dari hibah, pinjaman resmi (antar pemerintah disebut dengan G to G loans), hingga investasi, baik yang sifatnya jangka panjang (PMA) atau jangka pendek (portofolio investment). Dapat dikatakan bahwa secara hipotesis ada suatu korelasi positif antara I-S gap dan ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dana dari luar negeri (Tambunan, 2001).

Defisit karena adanya I-S gap yang telah berlangsung secara persistent tersebut harus dapat dibiayai dari capital inflows agar tidak mengganggu cadangan devisa yaitu dengan investasi. Investasi/penanaman modal merupakan pengeluaran untuk membeli barang – barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan

mengganti dan terutama menambah barang-barang modal perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sukirno, 2000). Investasi merupakan penambahan barang modal secara netto positif (Mangkusoebroto, 1998). Investasi merupakan suatu syarat yang perlu untuk pembentukan modal dimana Investasi berarti jumlah yang dikeluarkan selama suatu periode tertentu untuk output sekarang yang dipakai untuk meningkatkan stock barang modal. Melalui investasi inilah jumlah penghasilan atau output dan sumber produksi lainnya yang telah ditabung, dijabarkan ke dalam akumulasi modal (Anwar, 2017).

Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN, menurut undang-undang No.6 tahun 1968 PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio (Suyatno, 2003).

Investasi asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu: Penanaman Modal Asing/FDI dan investasi portofolio. Menurut Undang-Undang No.11 tahun 1970 PMA merupakan penanaman modal asing yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan proyek di Indonesia, dalam hal ini pemilik modal secara

langsung menanggung resiko atas penanaman modal tersebut. PMA merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksana, sehingga dinamika usaha yang menyangkut dinamika perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan/investor asing (Purnomo & Ambarsari, 2005). Menurut Krugman (1991) PMA adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain.

Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Terdapat 3 (tiga) kondisi yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan melakukan PMA, yaitu: (1) perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan dibandingkan perusahaan lain; (2) harus lebih menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri keunggulan tersebut daripada menjual atau menyewakan ke perusahaan lain; dan (3) harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input yang berlokasi di luar negeri (Sarwedi, 2002).

Investasi tidak langsung (portofolio) merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan mendapatkan manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham

dalam negeri oleh orang/perusahaan asing tanpa kontrol manajemen di perusahaan investasi (Purnomo, 2005).

Capital inflows untuk menutup adanya I-S gap dapat berupa Penanaman Modal Asing baik Foreign Direct Investment , portfolio, ataupun pinjaman luar negeri (baik oleh pemerintah maupun swasta). Pembiayaan defisit transaksi berjalan melalui Penanaman Modal Asing yang Foreign Direct Investment dipandang sebagai langkah yang paling aman dalam membiayai pembangunan, karena dana tersebut biasanya digunakan untuk kepemilikan dan kontrol atas pembangunan pabrik, peralatan, dan prasarana. Dengan demikian Penanaman Modal Asing tersebut meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sementara capital inflows dalam bentuk pinjaman memungkinkan untuk digunakan membeli barang-barang konsumsi, bukan untuk barang investasi. Disamping itu, capital inflows melalui Penanaman Modal Asing yang Foreign Direct Investment bersifat tidak lancar (tidak mudah ditarik dananya oleh investor), sehingga investor tidak dapat menarik dananya dengan segera. Hal ini berbeda dengan capital inflows dalam bentuk portofolio yang dapat ditarik secara mendadak dan dalam jumlah besar.

2.1.3 Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan

output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses,

bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Menurut Kuznets (1995) , pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun

informal. Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah:

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).

Pertumbuhan (growth), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.

- a. Pemerataan (equity), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.
- b. Berkelanjutan (sustainability), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator

ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh

kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai suatu barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas harga dasar menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (BPS, 2018)

Pengertian dari Produk Domestik Regional Bruto per kapita adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah dibagi dengan jumlah

penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data perkembangan lapangan usaha dan pertambahan jumlah penduduk, diperoleh data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita yang menunjukkan perkembangan dengan tren dan tendensi meningkat setiap tahunnya (Arthi Mudji,2016).

Konsepsi pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely dalam (Arthi Mudji, 2016) tersebut di atas pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Pada umumnya, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur besaran nilai tambahnya yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Todaro (2002) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah(baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Sebagai upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk

Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah dari produksi yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang dimana jika Produk Domestik Regional Bruto meningkat penyerapan tenaga kerja pun bertambah (Feriyanto, 2014). Dengan demikian peningkatan PDRB sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja. Peran tenaga kerja disini adalah meningkatkan hasil produksi.

2.1.4 Otonomi Khusus (Otsus)

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions). Pendelegasian pengeluaran (expenditure assignment) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik yang tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (revenue assignment). Tanpa pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna (Huda 2007).

Pendelegasian pengeluaran menjadi salah satu konsekuensi dari desentralisasi menjadikan kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan menjadi kriteria yang penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan menjalankan urusan rumah tangganya (Kaho 1997). Dengan kata lain, faktor keuangan menjadi salah satu tolak ukur dalam sebuah penilaian apakah suatu daerah

melaksanakan otonominya yang berarti daerah membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya (Aslym, 1999).

Keterkaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakikatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangan Pusat dan Daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Masalah hubungan keuangan antara Pusat dengan Daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya apabila masalah dalam pembagian tugas dan kewenangan antara Pusat dan Daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah daerah sudah tentu harus memiliki kewenangan membelanjakan sumber-sumber daya keuangannya agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Keadaan keuangan daerah yang sangat menentukan arah pemerintahan suatu daerah. Sehubungan dengan pentingnya kedudukan dari keuangan daerah ini maka pemerintah daerah tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho 2010). Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom akan hilang.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia saat era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang,

kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas money follows function. Masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (horizontal imbalances) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalances). Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja (expenditure) bukan dari sisi pendapatan (revenue) (Haryanto 2016).

Pengeluaran pemerintah yakni berupa pembayaran subsidi ataupun bantuan langsung pada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan dengan dua cara yang terpisah, yakni pertama melalui pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan bagian dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer berpengaruh terhadap hubungan antara output serta pendapatan (Y) dan Transfer ke Daerah merupakan dana yang mana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Dornbusch dan Fisher (1999) menegaskan bahwa perubahan dalam hal pengeluaran pemerintah serta pajak nantinya akan berpengaruh pada tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan suatu kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Apabila perekonomian berada dalam resesi, maka pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan, ini berguna untuk menaikkan output. Namun ketika berada pada masa makmur (*booming*) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi untuk dapat kembali pada penggunaan tenaga kerja penuh.

Berdasarkan teori efek pengeluaran pemerintah jika dihubungkan dengan konsep *budget line* Ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan meningkatnya pendapatan daerah, hal ini dikarenakan peningkatan *agregat demand* akan mampu mendorong kenaikan investasi, kemudian akhirnya akan meningkatkan produksi (Sukirno,2000).

Desentralisasi fiskal tidak dapat dibebaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia

Prinsip Otonomi Daerah Ada lima dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu: (1) Prinsip Kesatuan Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, (2) Prinsip Riil dan tanggung jawab Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah, (3) Prinsip Penyebaran Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah, (4) Prinsip Keserasian Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi dan (5) Prinsip Pemberdayaan Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa Fajri, (2021).

Dalam dimensi Otonomi Daerah ada dua nilai dasar yang dikembangkan UUD 1945 yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: (1) Nilai Unitaris,

dimensi ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (Eenheidstaat). Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI tidak terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah, (2) Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 UUD NKRI tahun 1945.

Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Dimana Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ruang Lingkup: (a) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (b) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (c) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pemberian dana otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat, pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, pengembangan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka mewujudkan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia.

Dalam bidang Keuangan Daerah, kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus adalah berupa adanya: Pos Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 25 tahun, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta Pos Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur (BPKAD Papua).

2.1.5 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD memiliki tujuan sebagai pedoman dalam mengatur pendapatan dan juga pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan daerah. Dengan disusunnya APBD, diharapkan dapat mencapai peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan membutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah untuk saat ini lebih didominasi oleh penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat sehingga kedepan secara bertahap diharapkan terjadi peningkatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua pengeluaran untuk pembangunan daerah dan sumber dana yang diperlukan tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam merencanakan sumber pendapatan dan alokasi belanja, pemerintah daerah harus melihat kebutuhan riil masyarakat berdasarkan potensi daerah dengan berorientasi pada kepentingan/skala prioritas pembangunan. Selain itu, APBD merupakan salah satu pendorong (*keyleverage*) bagi pertumbuhan ekonomi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

Halim (2000), mengataka bahwa ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah.dan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dalam arti sempit adalah terbatas

pada hal-hal yang berkaitan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, oleh karena itu keuangan daerah identic dengan APBD.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besaran PAD dalam postur APBD merupakan indikator kemandirian daerah. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari: (1) penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman, (2)

pengeluaran pembiayaan daerah adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan, pemberian pinjaman daerah.

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995).

Dalam Konsep Penerimaan Daerah (*Revenue Assigment*), pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan pada wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut merupakan Produk Domestik Regional Bruto daerah yang bersangkutan sehingga pendapatan yang timbul karena adanya kegiatan yang merupakan pendapatan regional.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal salah satu wujudnya adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat diolah dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Adapun bentuk dan jenis penerimaan bagi daerah adalah;

1. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang NO. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Transfer, mekanisme kebijakan transfer ke daerah, sebagaimana tercantum dalam UU N0.33 Tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, dana otsus dan dana penyesuaian. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dimana dana perimbangan terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Konsep Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*), secara teoritis bahwa pengeluaran pemerintah diarahkan pada dua tujuan utama: (1) untuk mendorong dan menggerakkan kegiatan ekonomi secara umum dan (2) untuk menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan tujuan tersebut maka pengeluaran pemerintah terbagi kedalam dua jenis pengeluaran pembangunan, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja tidak langsung didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, irigasi dan jaringan melalui peningkatan belanja modal APBD diharapkan mampu mendorong investasi baru di

daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Penelitian Alexiou (2009), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi publik berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara yang menggambarkan terjadinya peningkatan barang dan jasa yang telah dihasilkan sebagai syarat dalam proses pembangunan.

Teori Adolf Wagner dalam teorinya *Organic Theory of State* menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Dimana meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai satu kesatuan, Wagner mengatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan timbal balik dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan

tahap tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Teori Peacock dan Wiseman dimana Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya *Gross National Product (GNP)* menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal; seperti pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud atau barang inventaris dengan nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (1 tahun), termasuk di dalamnya menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Bentuk belanja modal seperti pembelian tanah, peralatan mesin, pembangunan gedung, bangunan, jalan, irigasi dan pembelian aset tetap lainnya (Muchlisin, 2020).

Menurut Darise (2008), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk

tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Halim (2008) Mengemukakan jenis belanja yang termasuk dalam kategori belanja Modal adalah 1) Belanja Modal Tanah, 2) Belanja Peralatan dan Mesin, 3) Belanja Gedung dan Bangunan, 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, 5) Belanja Aset Tetap lainnya, dan 6) Belanja Aset lainnya.

Menurut Mayeztika (2010), belanja modal dikelompokkan berdasarkan dua jenis belanja, yaitu:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang masa manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai

ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Contohnya: fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance, pembangunan jalan raya dan jembatan).

2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva lancar. Contohnya: belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Otonomi Khusus, Produc Domestic Regional Bruto dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan hal yang sangat di inginkan oleh setiap individu, dan kesejahteraan di ciptakan agar setiap individu mampu untuk mengembangkan kualitas hidup mereka, tentunya hal ini perlu di dukung oleh peran lembaga negara khususnya pada masyarakat daerah. Karena pertumbuhan kualitas hidup di sebagian besar daerah di Indonesia tidak merata bahkan belum merasakan dampak dari kebijakan pemerintahnya itu, oleh karena itu sebagai negara demokrasi sudah sepantasnya kita mendapat hal yang adil dan merata.

Otonomi Khusus merupakan salah satu bentuk usaha yang bertujuan di sektor pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing antar daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini di harapkan dapat memaksimalkan lembaga pemerintah daerah masing-masing agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas tinggi Rafi, (2021).

Prinsip otonomi Khusus dan investasi menjadi isu penting belakangan ini. Era otonomi itu ditandai dengan pendelegasian kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Fokus sekarang tidak lagi kepada kemampuan pemerintah daerah/lokal di dalam mengelola programnya sendiri, dimana efisiensi dan efektivitas perwujudan pelayanan umum dan persediaan barang adalah satu-satunya kegiatan yang terpenting. Bersamaan waktunya dengan berkembangnya partisipasi masyarakat daerah didalam pengambilan keputusan, otonomi daerah kemudian menjadi lebih dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan peranan masyarakat di dalam pemerintahan daerah/ lokal.

Otonomi Khusus dari sudut ekonomi sama dengan perdagangan bebas yang akan memberikan justifikasi ekonomi yaitu memecah konsentrasi ekonomi sehingga peredaran uang tidak hanya terjadi di Jakarta melainkan juga di daerah. Pengaturan otonomi daerah dapat membantu mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada daerah melakukan deregulasi untuk

menarik investor lokal dan asing. Tidak hanya melakukan deregulasi, investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kepastian di bidang hukum akan memberikan kemudahan bagi perkembangan ekonomi dan membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Semakin besar tingkat kepastian maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil. Begitu pula sebaliknya, kecilnya tingkat kepastian akan mengakibatkan kurangnya minat dalam investasi (Rahman, 2019).

Hanafi (2009), otonomi Khusus adalah otonomi yang seluas-luasnya. Artinya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Salah satu tujuan dari pemberian dana otonomi khusus adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat asli melalui pemanfaatan dan pengelolaan hasil kekayaan alam dengan empat program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta pembangunan infrastruktur.

Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan

ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sedangkan dalam UU No.18 Tahun 2001, dana otonomi khusus yang merupakan salah satu bentuk desentralisasi asimetris ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan daerah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan perkapita riil yang berlangsung terus menerus yang bersumber dari dalam daerah.

Sufyeti (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan

Pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. beralih menjadi desentralisasi, artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat. Menurut Zhouhaier (2012) pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dapat memberikan iklim yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan otonomi daerah yang lebih nyata, diperlukan

upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nopirin (2011), pengertian investasi mencakup investasi barang-barang tetap pada perusahaan (*business fixed investment*), persediaan (*inventory*) serta perumahan (*residential*). Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi juga mempunyai peranan penting dalam permintaan agregat. Pertama, biasanya pengeluaran investasi lebih tidak stabil dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi dan boom. Kedua, investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah (*stock*) capital dan investasi akan menambah jumlah (*stock*) dari capital.

Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Sedangkan persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi Menurut (Mankiw, 2006),

2.2.2 Hubungan Otonomi Khusus dan Investasi

Menurut teori Neo Klasik (Solow-Swan) ini (dalam Arsyad, 1999) pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (fullemployment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, penambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal output (capital output ratio) bisa berubah atau bersifat dinamis. Artinya untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan besarnya modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menyebut ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu negara, yaitu: (1)

Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah, (2) Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk, (3) Stok barang modal yang ada. Konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang dirumuskan sebagai berikut Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan konsep daerah otonom dalam Undang-undang dirumuskan sebagai berikut "Daerah otonom yang selanjutnya disebut sebagai daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik (UU No.32 Tahun 2004).

Pembangunan daerah juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga dengan adanya segala jenis pembangunan daerah, pembangunan fasilitas bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dengan begitu akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2018) menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap PDRB dikarenakan pembangunan infrastruktur untuk jangka panjang membuat perekonomian di daerah tersebut juga berkembang seiring dengan adanya transaksi perdagangan

yang dilakukan oleh masyarakat dengan negara tetangga yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat.

2.2.3 Hubungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesejahteraan Masyarakat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari penerimaan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain yang sah. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah. Menurut Mangkoesebroto (2008), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah

Menurut Munir dalam Hanafi & Mugroho (2009), kemandirian fiskal yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Kemampuan daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah diukur melalui peranan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin masing-masing daerah. Kemampuan keuangan daerah mengandung arti kemampuan daerah kabupaten dan kota untuk membiayai urusan-urusan rumah tangganya dalam melaksanakan pemerintahan yang berasal dari PADnya. Asumsi bahwa jika PAD dibawah 30% dari APBD, maka keputusan-keputusan ditingkat lokal didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini akan

mengurangi kredibilitas, kemandirian, dan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin menunjukkan bobot kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya.

Menurut Saragih (2003) dalam Titin Kartika Putri, (2014). Keberhasilan otonomi daerah diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB meningkat, maka hal ini akan mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD. Diyakini bahwa terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi daerah. Widjaya (2007) menyatakan bahwa sebenarnya bukanlah PAD yang dipacu jika membebani rakyat, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan tergantung kreativitas daerah.

Munir dalam Hanafi & Mugroho (2009) menyatakan kemandirian fiskal yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Pada dasarnya peningkatan PAD tidak hanya meningkatkan pajak daerah atau retribusi saja, melainkan dapat juga dengan cara meningkatkan PDRB. Menurut Saragih (2003), jika PDRB meningkat maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD. Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atakan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Darwanto dan Yustikasari (2007) juga menyatakan hal sama, bahwa belanja modal memiliki karakteristik

spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Todaro dan Smith (2003) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk social overhead dan ekonomi memberikan kesempatan kerja, menaikkan pendapatan dan selanjutnya meningkatkan kapasitas perekonomian. Sejalan dengan itu, Mankiw (2003) menjelaskan bahwa dengan didorong oleh insentif kebijaksanaan fiskal, seperti pemotongan pajak, akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tabungan masyarakat. Pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian, kembali ditegaskan Barro dan Sala Martin (2004) yang secara spesifik disebut sebagai pengeluaran produktif pemerintah, memiliki korelasi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap investasi swasta

2.2.4 Hubungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetap sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumberekonomi di antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan kapabilitas manusia. Dengan perkataan lain, yang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada tenaga kerja (Suparta, 2014)

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, menjadi subjek penting untuk dianalisis dan diperdebatkan. Kontroversi utama adalah sektor publik dapat menaikkan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi (long run steady state growth economy (Jamzani, 2007)). Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tingginya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah merupakan suatu faktor yang dapat mendorong terjadinya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat karena pembiayaan daerah salah satunya bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Azran (2007) yang menyatakan penerimaan royalti pertambangan batubara (APBD) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja seluruh sektor Realisasi anggaran belanja pembangunan atau belanja publik dibidang kesejahteraan masyarakat merupakan implementasi kebijakan anggaran oleh pemerintah daerah, peningkatan alokasi dana untuk kesejahteraan

masyarakat tidak akan ada artinya jika jumlah penduduk miskin juga meningkat.

Keterkaitan antara APBD dengan kesejahteraan masyarakat ini ditunjukkan dalam penelitian Panjaitan (1996) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk domestik Bruto (PDB) per kapita tenaga kerja. Ollukayode (dalam Inuwa, 2012), menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah salah satu instrument penting untuk mengontrol perekonomian.

Menurut Keynes dan Deliarnov (dalam Berutu, 2009), pemerintah perlu berperan dalam perekonomian dengan mengambil kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Lin, 1994). Pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi agent of development dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian.

2.3 Tinjauan Empiris

Heilda (2021), Pengaruh Investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sorong,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sorong hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara untuk investasi swasta tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara bersama pengeluaran pemerintah dan investasi swasta dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sorong

Fattah (2012), *Local Government Expenditure Allocation toward Human Development Index at Jeneponto Regency, South Sulawesi*, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pemerintah Pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan SDM .

Eid (2020), *The impact of government expenditure on GDP in the State of Qatar: a nonlinear ARDL approach*, Tujuan Studi ini menyelidiki hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan PDB di Negara Bagian Qatar dengan fokus pada PDB non-pertambangan dan penggalian selama periode 1980–2017 menggunakan model lag terdistribusi *autoregressive nonlinier* (NARDL). Hasil model NARDL menunjukkan dampak asimetris dari fluktuasi pengeluaran pemerintah karena peningkatan pengeluaran pemerintah dan belanja modal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB non-pertambangan Qatar, sedangkan penurunan kedua jenis pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

Biamrillah (2018), Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah Karesidenan Semarang. Alat analisis menggunakan panel regresi data. Hasil analisis menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah model efek acak (REM). Produk Domestik Bruto (PDRB) variabel dan populasi berpengaruh positif, sedangkan inflasi dan UMK tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Karesidenan Semarang.

Desak (2021), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan dan parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan investasi secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Suartini (2019), *Local Financial Performance and Its Impact on Border Community Welfare*, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kinerja keuangan daerah di daerah terluar dan terdepan Indonesia berdasarkan pada berbagai indikator penghitungan. Hasil analisis

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lokal terluar dan terdepan pemerintah di Indonesia memiliki rasio kemandirian keuangan yang sangat rendah. Daerah-daerah itu masih memprioritaskan pengeluaran pemerintahnya untuk memenuhi pembelian tidak langsung yaitu tidak memperhatikan untuk mengembangkan daerahnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah-daerah tersebut sampai saat ini belum memberikan dampak yang nyata dalam perbaikan perbatasan kesejahteraan rakyat.

Melasia (2014) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial otonomi daerah, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali tahun 1993-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan otonomi daerah, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali Tahun 1993-2012. Secara parsial pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan.

Karyantono (2014), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah dan upah minimum provinsi riil terhadap penyerapan tenaga kerja pada era otonomi daerah. Untuk mengetahui pengaruh tersebut digunakan regresi data panel dengan metode *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan

upah minimum provinsi riil tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, pada periode 2002-2006 ke 2007-2012 secara umum sektor pertanian dan transportasi mengalami penurunan rata-rata penyerapan tenaga kerja. Pada era otonomi daerah periode 2002-2006 ke 2007-2012 terjadi transformasi struktural penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.

Chodariyanti (2016) Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh alokasi pendapatan Anggaran dan Kabupaten Belanja (APBD) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Hasil penelitian bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember akan meningkat sementara korelasi antara Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan APBD dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember sangat kuat dan langsung.

Maryati (2021), Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penentu penyerapan tenaga kerja sektoral dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan demometrik. Hasil penelitian menunjukkan penyerapan tenaga kerja di Sumatra Barat dipengaruhi oleh variabel ekonomi (PDRB) dan variabel demografi (IPM). Implikasinya, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM menjadi faktor penting dalam upaya meraih bonus demografi di Sumatra Barat.

Din (2020), Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat menggunakan analisis klaster K-Means.

Berdasarkan analisis data, provinsi-provinsi di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga dimana klaster pertama terdiri dari 21 provinsi, klaster kedua terdiri dari 3 provinsi, dan klaster ketiga terdiri dari 10 provinsi. Setiap klaster memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dapat menjadi perhatian pihak-pihak terkait untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan sosial.

Habiburahman (2012). Penelitian ini yang bertujuan untuk memperjelas hubungan sebab akibat antar variabel dan menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu 30 tahun dan dianalisis dengan analisis regresi linier multivariat dengan teknik Ordinary Least Square (OLS) menggunakan program Eviews versi 7.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja juga bergantung pada Produk Domestik Bruto Daerah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Afrizal (2010). Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011”, hasil penelitian bahwa variabel penelitian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Belanja Pemerintah serta Tenaga Kerja secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan.

Najiah (2013), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan (DP) dan Tingkat partisipasi angkatan kerjan (TPAK) secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Depok.

Purbadharmaja (2019) *The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare*, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pemerintah dan masyarakat Bali masyarakat dalam desentralisasi pajak melalui penganggaran tampaknya tidak signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali masyarakat. Hasil Penelitian adalah Desentralisasi fiskal tidak selalu mengarah pada pengelolaan anggaran yang lebih baik. Kesuksesan desentralisasi fiskal dapat ditemukan pada kualitas anggaran daerah dan kualitas anggaran pengelolaan. Alokasi APBD untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Peningkatan ekonomi daerah kapasitas mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Orisinalitas/nilai Ketimpangan pendapatan ini menunjukkan masalah kapasitas fiskal. Perkembangan dari Peran keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali masih berada pada level gap dengan tingkat pembangunan dari kesejahteraan masyarakat. Selama

periode ini, peran keuangan pemerintah yang diperkirakan dari rasio APBN ke APBD lebih tinggi dari anggaran pembangunan masyarakat. Percepatan peran pemerintah tidak sebanding dengan perkembangan hasil Indeks Pembangunan Manusia.

Sutrisna (2021), *Regional Financial Management Strategies To Improve The Community Welfare In Bali Province*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literasi. Hasil penelitian adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah juga harus dikelola dengan prinsip transparansi agar masyarakat memiliki akses yang luas untuk mengetahui dokumen anggaran sehingga masyarakat mengetahui alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Strategi lain yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan anggaran dengan prinsip berkeadilan. Selain itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien agar anggaran yang dikelola terhindar dari kebocoran dan inefisiensi serta berdampak maksimal bagi pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat.

Akwalu (2020), *Constituency Development Fund (Cdf) And Its Effects On Community Welfare In Tigania East Constituency, Meru County Kenya*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak dari Dana Pembangunan Konstituensi (CDF) tentang kesejahteraan

masyarakat di Daerah Pemilihan Tigania Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana devolusi berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat masyarakat Daerah Pemilihan Tigania Timur. Temuan mengungkapkan bahwa semua variabel independen terutama; (X1) proyek pemuda, (X2) program kesehatan, (X3) proyek infrastruktur dan (X4) pendidikan program memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sudiarta (2019), *The Effect Of Regional Financial Performance On Inclusive Economic Growth And Community Welfare In Regency/ City Of Bali Province*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan masyarakat kabupaten (kota) Provinsi Bali selama tahun 2012-2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan masyarakat kabupaten (kota) di Provinsi Bali, selama tahun 2012-2017, dan pertumbuhan ekonomi inklusif secara statistik memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap masyarakat. kesejahteraan. Adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan antar daerah di Provinsi Bali, sehingga diharapkan pemerintah dapat meratakan pembangunan infrastruktur untuk menarik investor di luar daerah Bali Selatan.